

**PENGARUH REGULASI, POLITIK ANGGARAN,
PERENCANAAN ANGGARAN, KUALITAS SUMBER DAYA
MANUSIA, PENGADAAN BARANG/JASA , DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
(Studi Empiris di OPD Kabupaten Magelang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun oleh :
Weni Prabatiwi Mustika Ningtyas
NPM. 17.0102.0118

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

**PENGARUH REGULASI, POLITIK ANGGARAN,
PERENCANAAN ANGGARAN, KUALITAS SUMBER DAYA
MANUSIA, PENGADAAN BARANG/JASA , DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
(Studi Empiris di OPD Kabupaten Magelang)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**

Disusun oleh :

Weni Prabatiwi Mustika Ningtyas
NPM. 17.0102.0118

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2020**

SKRIPSI

**PENGARUH REGULASI, POLITIK ANGGARAN, PERENCANAAN ANGGARAN,
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGADAAN BARANG/JASA, DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
(Studi Empiris di OPD Kabupaten Magelang)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

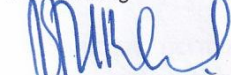
Weni Prabatiwi Mustika Ningtyas

NPM 17.0102.0118

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 24 Juli 2020

Susunan Tim Penguji

Pembimbing



Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc., Ak

Pembimbing I

Pembimbing II

Tim Penguji



Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc., Ak

Ketua



Muji Murnani, S.E., M.Si., Ak., CA

Sekretaris



Veni Soraya Dewi, S.E., M.Si

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal **31 AUG 2020**



Dra. Marlina Kurnia, MM

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Weni Prabatiwi Mustika Ningtyas
NIM : 17.0102.0118
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Progam Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**PENGARUH REGULASI, POLITIK ANGGARAN, PERENCANAAN
ANGGARAN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGADAAN
BARANG/JASA , DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP
PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
(Studi Empiris di OPD Kabupaten Magelang)**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 2020
Pembuat Pernyataan,



Weni Prabatiwi Mustika Ningtyas
NIM. 17.0102.0118

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Weni Prabatiwi Mustika Ningtyas
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 15 Mei 1992
Agama : Islam
Status : Menikah
Alamat Rumah : Jl. Borobudur A6 Perum Bumirejo indah Mungkid
Alamat Email : weniprabatiwil@gmail.com

Pendidikan Formal

SD (1998-2003) : SD Negeri 1 Gondangsari
SMP (2003-2006) : SMP Negeri 1 Juwiring
SMA (2006-2009) : SMA Negeri 3 Sukoharjo
D III (2009-2012) : D III Keuangan dan Perbankan UNS
PT (2017-2020) : S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang

Magelang, 2020
Peneliti,



Weni Prabatiwi Mustika Ningtyas
NIM. 17.0102.0118

MOTTO

“Tuntutlah ilmu sejak dari buaian sampai liang lahat”.
(al-hadist)

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur”.
(QS. Yusuf : 87)

“Maka sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirah 5-6)

“ Maka apabila engkau telah selesai (dari satu urusan),
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan), dan hanya kepada
Tuhanmu lah hendaknya engkau berharap”.
(QS. Al-Insyirah 7-8)

“Jadilah seperti pohon yang tumbuh dan berbuah lebat. Dilempar dengan batu tapi
membalasnya dengan buah”.
(Ali Bin Abi Thalib)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyanyang, atas segala rahmat dan berkah-Nya lah penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH REGULASI, POLITIK ANGGARAN, PERENCANAAN ANGGARAN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGADAAN BARANG/JASA , DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA (Studi Empiris Di OPD Kabupaten Magelang).”**

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang. terselesainya skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penghargaan yang tulus, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Nur Laila Yuliyani, S.E., M.Sc., Ak selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Wawan Sadtyo Nugroho, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
3. Ibu Muji Mranani, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah membantu memberikan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
4. Ibu Veni Soraya Dewi, S.E., M.Si selaku dosen penguji 2 (dua) yang sudah membantu memberikan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
5. Yang terkasih Papa Rowi, nak Alfian penyemangat dalam menyelesaikan studi yang tiada hentinya memberikan doa dan mengobarkan semangat menggapai cita-cita.
6. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya dan telah membantu kelancaran selama menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Bapak ibu dan seluruh keluarga Klaten Kebumen yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
8. Rekan kerja dan sahabat di Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang terimakasih atas semangat dan bantuan sarana prasarannya.
9. Teman kelas Akuntansi 15, 16 , 17, 18 Paralel terspesial mbak Fajriatul Azizah, S.Ak yang telah menemani penulis selama perkuliahan.
10. Sahabat-sahabat, teman-teman dan semua pihak yang selalu menyemangati penulis.

Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran untuk masukan bagi penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	13
A. Telaah Teori	13
B. Telaah Penelitian Sebelumnya	22
C. Perumusan Hipotesis.....	23
D. Model Penelitian	30
BAB III METODA PENELITIAN	31
A. Populasi dan Sampel	31
B. Teknik Pengambilan Sampel	31
3. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	33
4. Alat Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Statistik Deskriptif Data.....	42
B. Statistik Deskriptif Responden.....	42
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	44
D. Uji Kualitas Data.....	47
E. Analisis Regresi Linear Berganda.....	49
F. Pengujian Hipotesis.....	50
G. Pembahasan.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Keterbatasan Penelitian.....	63
C. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Langsung	3
Tabel 2.1 Telaah Penelitian Sebelumnya	22
Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	33
Tabel 4.1 Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian Kuesioner	42
Tabel 4.2 Profil Responden	43
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	44
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas	47
Tabel 4.5 Cross Loading	48
Tabel 4.6 Uji Reliabilitas	49
Tabel 4.7 Koefisien Regresi	50
Tabel 4.8 Uji R^2	50
Tabel 4.9 Uji F	51
Tabel 4.10 Uji t	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	30
Gambar 3.1 Uji F	40
Gambar 3.2 Uji t Kriteria Positif	41
Gambar 4.1 Nilai Uji F	52
Gambar 4.2 Nilai Uji t Regulasi.....	53
Gambar 4.3 Nilai Uji t Politik Anggaran	53
Gambar 4.4 Nilai Uji t Perencanaan Anggaran.....	54
Gambar 4.5 Nilai Uji t Kualitas Sumber Daya Manusia	54
Gambar 4.6 Nilai Uji t Pengadaan Barang/ Jasa.....	55
Gambar 4.7 Nilai Uji t Pelaksanaan Anggaran	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	69
Lampiran 2. Tabulasi Data Kuesioner (Data Mentah).....	75
Lampiran 3. Tabulasi Data Kuesioner (Setelah Validasi).....	91
Lampiran 4. Statistik Deskriptif.....	107
Lampiran 5. Uji Validitas.....	108
Lampiran 6. Uji Reliabilitas.....	114
Lampiran 7. Uji Hipotesis	115
Lampiran 8. Bukti Penerimaan Kuesioner	116
Lampiran 9. Surat Ijin Penelitian	118

ABSTRAK

PENGARUH REGULASI, POLITIK ANGGARAN, PERENCANAAN ANGGARAN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGADAAN BARANG/JASA , DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA (Studi Empiris di OPD Kabupaten Magelang)

Oleh :

Weni Prabatiwi Mustika Ningtyas

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran, sumber daya manusia, pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja. Penelitian ini menggunakan sampel pegawai yang bekerja di OPD Kabupaten Magelang sebanyak 18 OPD Dinas dan 3 OPD Badan. Jumlah sampel penelitian ini adalah 86 responden, berdasarkan metode *purposive sampling*, yaitu aparat pemerintah daerah Kabupaten Magelang yang menduduki jabatan yang berkaitan dengan anggaran, antara lain Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Kasubbag Keuangan, PPTK, Bendahara Pengeluaran, dan Staf bagian Keuangan dan Perencanaan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja dan regulasi berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran belanja. Sedangkan perencanaan anggaran, sumber daya manusia, pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja.

Kata Kunci : *Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang/ Jasa, Pelaksanaan Anggaran dan Penyerapan Anggaran Belanja.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Anggaran sebagai kebijakan ekonomi yang berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan Negara (Bastian, 2010). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah dalam Permendagri Nomor 21 tahun 2011 disebutkan bahwa segala bentuk Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD.

Penerapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan agar pemerintah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dengan pemberian bantuan dana untuk menjalankan kewenangan tersebut.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tolak ukur yang menunjukkan keberhasilan program atau kebijakan yang telah dilakukan

suatu pemerintah (Anfujatin, 2016). Deviasi pada realisasi terhadap anggaran membuktikan telah terserapnya anggaran dalam berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran yang dimaksud adalah keberhasilan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan ketentuan didalam APBD.

Salah satu permasalahan dalam anggaran pemerintah adalah penyerapan anggaran yang cenderung rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun menyebabkan ketidakmerataan penyerapan anggaran (Suwarni & Ma'aruf, 2018). Disebutkan pula dalam *World Bank*, 2015 bahwa negara-negara berkembang seperti Indonesia mempunyai permasalahan yang sama dalam penyerapan anggaran yang disebut "*slow back-loaded*", artinya penyerapan anggaran yang rendah pada semester pertama, namun akan melonjak memasuki akhir tahun anggaran. Rendahnya penyerapan anggaran merupakan masalah yang sering dihadapi disetiap tahun anggaran. Keterlambatan realisasi anggaran yang menumpuk di akhir tahun berdampak pada kualitas kinerja pemerintah. Permasalahan ini dapat menghambat proyek yang ada dan akhirnya mengganggu laju pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut (Iqbal, 2018).

Selaras dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, OPD berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui realisasi anggaran dan belanja. Penyerapan anggaran yang lambat perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah terutama untuk jenis belanja barang dan belanja modal yang akan berdampak pada sasaran kinerja OPD.

Fenomena penyerapan anggaran belanja ini juga terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Magelang. Keterlambatan penyerapan anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi penyerapan anggaran diantaranya meliputi kesiapan satuan kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan, pemahaman satuan kerja dalam mekanisme pelaksanaan pencairan anggaran, proses dalam pengadaan barang dan jasa dan berbagai faktor internal lainnya.

Tabel 1.1
Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Langsung
Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2016- 2019

No	Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	% Keuangan
1	2016	736.019.704.020	631.894.938.270	85,85
2	2017	1.254.128.725.778	813.127.360.968	64,84
3	2018	1.081.595.238.628	958.693.240.730	88,64
4	2019*	1.144.681.295.144	870.395.302.956	76,04

Sumber : Bagian Administrasi Bangda Kabupaten Magelang

*Data *unaudited*

Realisasi serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2016–2018 masih dibawah kisaran 90 persen. Capaian kinerja APBD Kabupaten Magelang tahun anggaran 2016 pada akhir tahun anggaran capaian penyerapan anggaran belanja langsung mencapai 85,85 persen, dan turun menjadi 64,84 persen ditahun 2017, kemudian kembali membaik di tahun 2018 menjadi 88,64 persen. Data ini menjelaskan bahwa daya serap anggaran belanja pemerintah Kabupaten Magelang belum maksimal karena belum sesuai dengan target yang diinginkan.

Tahun Anggaran 2019, dari total alokasi untuk Belanja Langsung sebesar Rp1.144.681.295.144,00, yang digunakan untuk membiayai 1.921

kegiatan, sampai dengan akhir tahun anggaran hanya terserap sebesar Rp870.395.302.956,00 atau hanya 76,04 persen dari target 100,00 persen, kesenjangannya cukup besar yaitu 23,96 persen.

Penyerapan anggaran dalam sistem penganggaran berbasis kinerja memang tidak dapat dijadikan sebagai indikator buruknya kinerja birokrasi, akan tetapi kondisi perekonomian saat ini masih sangat bergantung pada konsumsi pemerintah, sehingga belanja pemerintah turut menjadi salah satu penggerak roda perekonomian di daerah yang pada akhirnya mendorong terciptanya *multiplier effect* bagi daerah tersebut sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu, adanya dana yang tidak terserap hingga akhir tahun anggaran menunjukkan adanya inkonsistensi antara perencanaan anggaran dan realisasi. Meskipun dana tersebut dapat dimanfaatkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, tetapi berdasarkan konsep *time value of money* dana tersebut berpotensi berkurang atau bahkan kehilangan manfaat belanja yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran antara lain adalah faktor regulasi, regulasi digunakan oleh OPD dalam mewujudkan kebijakan organisasi dalam menghadapi isu dan permasalahan yang ada. Namun dikarenakan banyaknya aturan yang berubah secara cepat sementara waktu pelaksanaan yang terbatas, sehingga dalam pelaksanaan anggaran mengalami kendala dalam pelaksanaannya dari suatu kegiatan yang menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran di instansi pemerintah.

Penelitian Alimudin (2018) menyatakan bahwa regulasi berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Faktor penyebab ketidakmerataan penyerapan anggaran berkaitan dengan faktor regulasi karena regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat justru membuat penyerapan APBD di pemerintahan daerah mengalami ketidakmerataan. Oleh karena itu strategi yang dapat diberikan terkait pemasalahan pada regulasi tersebut salah satunya adalah dengan adanya kebijakan penyerapan anggaran, sehingga dengan adanya kebijakan tersebut penyerapan anggaran yang diperoleh dapat semaksimal mungkin (Salamah, 2018).

Hasil penelitian Ramadhani & Setiawan (2019) juga menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran, salah satunya disebabkan regulasi yang dilihat dari bagaimana pemahaman dan kepatuhan setiap pegawai mengenai peraturan yang ada. Akan tetapi, hasil penelitian yang menyebutkan bahwa faktor regulasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran tidak didukung oleh hasil penelitian Rifai & Inapty (2016) yang menyatakan sebaliknya, bahwa regulasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Oleh karena itu faktor regulasi terdapat ketidakkonsistenan hasil yang mempengaruhi faktor regulasi.

Faktor lain yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah faktor politik anggaran. Anggaran yang digunakan merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Menurut Mardiasmo

(2002) anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik (*political tool*). Anggaran publik tidak hanya proses teknis maupun manajerial tetapi juga bersifat politis.

Penelitian yang dilakukan Sanjaya et al. (2018) menyatakan bahwa politik anggaran mempengaruhi penyerapan anggaran, dimana politik anggaran menunjukkan peranan pemerintah dalam mengatur pembelanjaan keuangan daerah sebagai salah satu kewajiban dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan anggaran. Namun berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Ramadhani & Setiawan (2019) yang menyatakan sebaliknya bahwa politik anggaran tidak mempengaruhi penyerapan anggaran, sehingga terdapat ketidakkonsistenan hasil yang mempengaruhi faktor politik anggaran.

Permasalahan perencanaan yang timbul didalam penyerapan anggaran disebabkan karena konsep perencanaan yang tidak matang dalam penentuan anggaran berdampak kepada program kerja yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Selain itu, masalah yang terjadi pada perencanaan juga terjadi karena adanya anggapan anggaran yang diusulkan tidak semuanya akan disetujui. Akhirnya mengusulkan anggaran yang lebih besar dari yang dibutuhkan tanpa memikirkan kebutuhan riil yang ada di lapangan.

Faktor lemahnya perencanaan juga menjadi kendala pada saat pembuatan perencanaan yang menyebabkan penyerapan anggaran menjadi lambat. Dalam penelitian Ramadhani & Setiawan (2019) menyebutkan faktor yang berpengaruh besar terhadap penyerapan anggaran adalah faktor perencanaan,

karena semakin matang aparatur pemerintah sebagai pengelola anggaran dalam merencanakan maka kegiatan/program yang ditargetkan akan berjalan dengan baik pula. Hasil penelitian yang dilakukan Dwiyana (2017) juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Iqbal (2018) yang menyatakan bahwa faktor perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifai & Inapty (2016) yang menyatakan sebaliknya bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aparat yang mengelola keuangan juga menjadi faktor penyerapan anggaran. Hal ini sesuai dengan penelitian Renoat & Latupeirissa (2016) bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sumber daya manusia sebagai pengelola keuangan harus memiliki pengetahuan, kemampuan, motivasi dan persepsi yang baik. Keterbatasan SDM yang ada di antaranya adalah kurangnya jumlah pegawai, adanya perangkapan pekerjaan, dan pola mutasi yang tidak merata.

Penelitian Anfujatin (2016) menyatakan permasalahan sumber daya manusia terjadi berawal dari rangkap tugas dalam panitia pengadaan, hal ini karena tidak seimbangnya antara paket pekerjaan dengan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan peraturan sehingga mengakibatkan belum optimalnya dalam penyerapan anggaran. Sumber daya manusia merupakan faktor yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja. Penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa sumber

daya manusia (SDM) berpengaruh pada penyerapan anggaran, yang dilakukan oleh Mutmainna (2017). Akan tetapi, hasil penelitian yang menyatakan bahwa faktor sumber daya manusia berpengaruh pada penyerapan anggaran ternyata tidak didukung oleh hasil penelitian Alimudin (2018), Ramadhani & Setiawan (2019) yang menyatakan sebaliknya bahwa sumber daya manusia tidak mempengaruhi penyerapan anggaran.

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tugas organisasi sektor publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Bastian, 2010). Ramadhani & Setiawan (2019) menjelaskan faktor pengadaan barang dan jasa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja. Faktor pengadaan barang dan jasa satuan kerja yang buruk dalam pelaksanaan kegiatan mempunyai kecenderungan memperlambat penyerapan anggaran satuan kerja. Senada dengan itu penelitian yang dilakukan oleh Gagola (2016) dan Alimudin (2018) juga menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran disebabkan oleh faktor pengadaan barang/jasa. Namun lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2017) dan Sanjaya et al. (2018) yang menyatakan sebaliknya bahwa pengadaan barang/jasa tidak mempengaruhi penyerapan anggaran.

Penelitian ini merupakan mengembangkan dari penelitian Ramadhani & Setiawan (2019), dengan persamaan menggunakan semua variabel yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Sedangkan perbedaan yang **pertama**, yaitu menambah variabel independen pelaksanaan anggaran sesuai dengan saran penelitian Ramadhani & Setiawan (2019). Pelaksanaan

anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan anggaran dilakukan dengan koordinasi yang baik di semua tingkatan pada semua instansi / dinas dan satuan pelaksana yang terkait, untuk menghindari adanya tumpang tindih atau *over lapping*. Oleh karena itu, semakin baik pelaksanaan anggaran, maka akan dapat mempengaruhi penyerapan anggaran. Pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran (Ramdhani & Anisa, 2017).

Perbedaan **kedua** adalah objek penelitian di Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. OPD bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas sesuai dengan visi misi Bupati terpilih selama lima tahun kedepan. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi akan mencerminkan tercapainya program dan kegiatan yang seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kabupaten Magelang masih memiliki permasalahan dalam tingkat penyerapan anggaran, dimana pada Kabupaten Magelang sendiri tingkat penyerapan anggarannya masih dibawah target yaitu kisaran 90% dan naik turun pada setiap tahunnya (simoneva.magelangkab.go.id).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah regulasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja?
2. Apakah politik anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja?
3. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja?

4. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja?
5. Apakah pengadaan barang/ jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja?
6. Apakah pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji dan menganalisis pengaruh regulasi terhadap penyerapan anggaran belanja.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh politik anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran belanja.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh pengadaan barang/ jasa terhadap penyerapan anggaran belanja.
6. Menguji dan menganalisis pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Praktis

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menyajikan Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya

Manusia, Pengadaan Barang/ Jasa dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD Kabupaten Magelang, yang diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi pembaca.

2. Kontribusi Teoritis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Magelang untuk mengevaluasi hal-hal yang dapat ditingkatkan agar memaksimalkan penyerapan anggaran belanja.

b. Bagi Akademisi (Mahasiswa)

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai penelitian tentang penyerapan anggaran belanja OPD.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi alasan memilih judul penelitian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berisi teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok – pokok masalah dalam penelitian berupa telaah teori, hasil penelitian terdahulu, hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan pembahasan. Bagian ini menjadi titik perhatian karena dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan program SPSS berupa analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas data, analisis regresi dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori Keagenan

Penyerapan anggaran dalam perspektif teori keagenan muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer. Pemisahan pemilik dan manajemen di dalam literature akuntansi disebut dengan teori keagenan. Teori agensi menunjukkan hubungan antara dua pihak yang terlibat kontrak terdiri dari agen sebagai pihak yang diberi tanggung jawab atas tugas dan prinsipal sebagai pihak memberi tanggung jawab.

Penelitian ini didasarkan atas teori keagenan yang mengaitkan hubungan diantara pemerintah sebagai *agent* dan rakyat sebagai *principal*. Pemerintah sebagai pemegang amanah dari rakyat berkewajiban agar memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan serta mengungkapkan semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat selaku pihak pemberi amanah (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan sudah dipergunakan pada sektor publik baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Hubungan ini mengalami perbedaan dalam kepentingan agen dan prinsipal,

adanya perbedaan informasi yang dimiliki terkait usaha antara agen dengan prinsipal sehingga dapat menimbulkan konflik diantara keduanya.

Teori keagenan mendukung terciptanya regulasi untuk mengatur peraturan yang dipakai dalam pelaksanaan kontrak kerja antara *agent* dan *principal*. Sedangkan politik anggaran merupakan penerapan teori keagenan dimana permintaan *principal* kepada *agent* untuk melaksanakan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan *agent* yang diwakili oleh LSM, Partai Politik atau Badan Legislatif Pemerintah.

Perspektif keagenan merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*) yang menjadi alat bagi *principal* untuk mengawasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran oleh *agent*. Kaitannya dengan proses pengadaan barang/ jasa adalah usaha yang dilakukan oleh *agent* untuk melaksanakan kontrak kerja kepada *principal* dengan memanfaatkan sumber daya manusia didasari dengan kontrak kerja yang disepakati.

2. Anggaran

Menurut Bastian (2006) anggaran merupakan pernyataan tertulis berupa ukuran finansial mengenai estimasi kinerja masa depan yang hendak dicapai selama periode tertentu biasanya satu tahun. Anggaran yang telah disusun akan dievaluasi pada akhir tahun untuk melihat apakah estimasi kinerja tersebut telah tercapai. Pencapaian kinerja merupakan ukuran prestasi kerja organisasi publik yang akan dicapai, dan diukur dalam bentuk kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002) anggaran pada sektor publik adalah suatu rencana kerja yang dirancang oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk ukuran angka satuan uang, yang memuat informasi mengenai pendapatan, belanja, aktivitas, dan pembiayaan dalam satuan moneter. Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktifitas.

3. Belanja Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:

- a. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
- b. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai

yang dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/ upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah; belanja barang dan jasa; dan belanja modal

4. Penyerapan Anggaran

Menurut Halim (2014), bahwa penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran). Secara lebih mudah, masyarakat umum menyebutnya pencairan anggaran. Oleh karena yang diamati adalah entitas pemerintahan atau organisasi sektor publik, maka penyerapan anggaran dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertentu.

Senada dengan pendapat Halim, menurut Kuncoro (2013) bahwa penyerapan anggaran adalah salah satu dari beberapa tahapan dalam siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPRD), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.

5. Regulasi Keuangan Daerah

Regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan, maupun organisasi sosial lainnya (Bastian, 2010). Salah satu peraturan

pengelolaan keuangan daerah yaitu Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menimbang bahwa dengan adanya pengalihan dana Bantuan Operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penetapan peraturan perundang-undangan mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah harus dibentuk dan dipatuhi oleh setiap pengguna anggaran, agar setiap dana publik yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan dengan landasan hukum yang jelas.

6. Politik Anggaran

Politik anggaran dapat dimaknai sebagai proses pengalokasian anggaran berdasarkan kemauan dan proses politik, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Tidak dapat dihindari bahwa penggunaan dana publik akan ditentukan oleh kepentingan politik. Menurut Sanjaya et al. (2018) politik anggaran dapat dimaknai sebagai proses pengalokasian anggaran berdasarkan kebutuhan dan proses politik, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Politik anggaran memang tak dapat dihindari, hal ini terjadi sebuah dorongan kepentingan legislatif dengan pemerintah secara langsung dapat mempercepat waktu dalam pengimplementasian program kerja yang sudah disepakati di awal tahun anggaran. Akibat yang ditimbulkan dari faktor politik tersebut menjadikan OPD langsung dapat mengimplementasikan program kerjanya jika hal tersebut sesuai dengan prioritas kebutuhan dan keadilan seperti yang telah disepakati oleh legislatif.

7. Perencanaan Anggaran

Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks perencanaan pembangunan pemerintah, maka penyusunannya terutama berpedoman pada UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk melaksanakan pembangunan pemerintah telah merencanakan target-target pembangunan dimasa mendatang.

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan tindakan pada masa yang akan datang, sehingga penting dilakukan sebelum melakukan suatu kegiatan/ pekerjaan. Menurut Halim & Kusufi (2012) mendefinisikan anggaran sebagai alat perencanaan anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja tersebut.

Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2013) perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu. Tidak adanya konsep perencanaan penggunaan anggaran secara riil tentu akan berdampak pada munculnya sejumlah kesulitan dalam mengarahkan penggunaan anggaran dengan tepat sasaran. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk (Mardiasmo, 2002):

- a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.

- b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.
- c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, dan
- d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

Perencanaan yang anggaran yang buruk adalah hambatan yang signifikan yang mencegah penyerapan anggaran. Perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu, diantaranya mengenai partisipasi, akurasi data, pengesahan APBD, pendekatan dan instrumen dalam penyusunan anggaran, perencanaan dan kebutuhan serta revisi atau perubahan (Zarinah, 2016).

8. Kualitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan SDM pada intinya diarahkan untuk meningkatkan kualitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas. Kemampuan Sumber Daya Manusia merupakan kualitas seseorang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya didalam sebuah instansi/perusahaan (Yunita & Putra, 2018). Permasalahan sumber daya manusia terjadi berawal dari rangkap tugas dalam panitia pengadaan, hal ini karena tidak seimbangnya antara paket pekerjaan dengan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan peraturan sehingga mengakibatkan belum optimalnya dalam penyerapan anggaran (Anfujatin, 2016).

Amiruddin (2009) mendefinisikan kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam menyusun kebijakan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan menurut *United Nations Development Programs* (2008), mengartikan kapasitas SDM sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau individu, yang mengacu pada keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan baik yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik sangat dibutuhkan didalam setiap OPD karena mereka sebagai pelayan publik, aparatur pemerintah dan sebagai pelaku bisnis BUMN/BUMD yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta seluruh perubahannya adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Sistem pengadaan adalah suatu cara untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu. Ada dua macam sistem pengadaan yang umum digunakan, yaitu sistem konvensional dan sistem eprocurement. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

beserta seluruh perubahannya, menerangkan bahwa ada beberapa pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa yaitu:

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- c. Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan (ULP/PP).
- d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- e. Penyedia Barang/Jasa

10. Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP,2011). Proses pelaksanaan meliputi pengaturan terhadap penggunaan alat-alat yang di perlukan, siapa yang melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, waktu pelaksanaannya dan dimana tempat pelaksanaannya.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran merupakan upaya-upaya untuk merealisasikan perencanaan anggaran yang telah dibuat. Pelaksanaan anggaran merupakan aktivitas yang dilaksanakan, yang terkait dengan penggunaan anggaran.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Telaah Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Anisa (2017)	Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.	Terdapat pengaruh Positif dan Signifikan kualitas sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran. Terdapat pengaruh Positif dan Signifikan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.
2	Ramdhani & Anisa (2017)	Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten	Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten
3	Mutmainna (2017)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.	Pergantian Pimpinan, Dokumen Perencanaan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dokumen Pengadaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Pencatatan Administrasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran
4	Sanjaya et al. (2018)	Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Pada OPD Provinsi Sumatera Barat.	Regulasi keuangan daerah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Politik Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran.

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
			Pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran.
5	Ramadhani & Setiawan (2019)	Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang/ Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD Provinsi Sumatera Barat.	Regulasi, Perencanaan Anggaran dan Pengadaan Barang/ Jasa berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja. Politik Anggaran dan Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran belanja pada OPD Provinsi Sumatera Barat.

Sumber: data penelitian terdahulu diolah, 2020.

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Regulasi terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Sistem regulasi keuangan daerah adalah sebuah sistem yang dibuat untuk mengendalikan pelaksanaan siklus keuangan daerah agar segala tindakan atas pengendalian tersebut dapat dirangkum dalam peraturan tertentu (Yunita & Putra, 2018). Faktor regulasi yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu dilihat dari bagaimana pemahaman dan kepatuhan setiap pegawai daerah mengenai peraturan yang ada.

Teori keagenan mendukung terciptanya regulasi untuk proses penyerapan anggaran. Pemerintah dibutuhkan peranannya untuk mengatur ketentuan-ketentuan terhadap kebijakan publik. Ketentuan diperlukan agar semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat mendapatkan informasi yang sama dan

seimbang. Regulasi terkait dengan peraturan pemerintah pusat maupun peraturan daerah, dimana permasalahannya terjadi mengenai pergantian regulasi, pemahaman dan kepatuhan ASN, sehingga menyebabkan penyerapan anggaran menjadi terganggu. Semakin tinggi tingkat kepatuhan dan pemahaman terhadap regulasi akan meningkatkan penyerapan anggaran belanja.

Hasil penelitian Ramadhani & Setiawan (2019) menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara regulasi dengan penyerapan anggaran. Sejalan dengan hasil penelitian Widianingrum (2017) dan Salamah (2018) yang menyatakan bahwa faktor regulasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

H1. Regulasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja.

2. Pengaruh Politik Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Belanja.

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan alat politik (*political tool*) sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu (Mardiasmo, 2002). Apabila dalam pelaksanaan anggaran sesuai dengan kepentingan politik atau pelaksanaan yang diajukan sesuai dengan prioritas yang telah disepakati bersama, maka secara tidak langsung dapat mempercepat waktu kegiatan/program kerja.

Teori keagenan menjelaskan bahwa agen harus mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan *principal*. OPD dalam pelaksanaan anggaranya

harus mampu memenuhi kebutuhan rakyat yang disini diwakili oleh DPRD, LSM dan politisi sebagai penampung aspirasi masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa politik anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, apabila kebutuhan politik terpenuhi maka penyerapan anggaran akan lebih cepat dicapai, ini disebabkan karena setiap anggaran yang diajukan oleh pemerintah sesuai dengan prioritas yang disepakati bersama dan disetujui eksekutif.

Hasil penelitian Sanjaya et al. (2018) menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara politik anggaran dengan penyerapan anggaran. Sejalan dengan penelitian Handayani (2017).

H2. Politik anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja.

3. Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Belanja.

Menurut Arif dan Halim, 2013 (dalam Iqbal, 2018) bahwa semakin matang pengelola anggaran dalam merencanakan, maka program kerja/kegiatan dalam satu tahun anggaran akan berjalan dengan baik, sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai. Namun sebaliknya apabila perencanaan kegiatan yang kurang matang akan berimplikasi pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaannya. Perencanaan anggaran yang tidak baik sering menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga harus direvisi atau bahkan tidak dapat direalisasi sama sekali. Perencanaan anggaran juga memberi kontribusi bagi penyerapan anggaran pemerintah daerah.

Hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif (pemerintah) adalah *agent* dan legislatif (para wakil rakyat yang duduk di parlemen) adalah *principal*. Sebelum penyusunan APBD dilakukan, terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang arah dan kebijakan umum serta prioritas anggaran, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD. Eksekutif membuat rancangan APBD yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda). Perspektif keagenan merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*) yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. Semakin baik perencanaan anggaran yang disusun, akan memudahkan proses realisasi pada tahun anggaran yang dilaksanakan sehingga meningkatkan penyerapan anggaran belanja.

Hasil penelitian Anfujatin (2016), Mutmainna (2017), Widianingrum (2017), Iqbal (2018), Ramadhani & Setiawan (2019) menyatakan bahwa faktor perencanaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

H3. Perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja.

4. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Belanja.

Sumber daya manusia yang kompeten akan menjadi kelebihan tersendiri bagi organisasi pemerintah sekaligus sebagai pendukung daya saing pada era globalisasi dalam menghadapi lingkungan serta kondisi sosial masyarakat

yang senantiasa mengalami perubahan dinamis. Sebaliknya, apabila suatu organisasi memiliki sumber daya manusia yang kurang kompeten akan berakibat pada menurunnya pencapaian tujuan organisasi.

Sesuai dengan teori keagenan, sumber daya manusia yang dipakai haruslah mampu melaksanakan tugas sesuai dengan kontrak yang disepakati. ASN yang bekerja pada setiap OPD memiliki perjanjian kinerja tertulis yang harus dilaksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kemampuan yang dimiliki ASN akan sangat mempengaruhi hasil kinerja yang ditargetkan utamanya yang berkaitan dengan penyerapan anggaran OPD. Hasil penelitian Anfujatin (2016), Nugroho (2017) dan Mutmainna (2017) menyatakan bahwa faktor sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

H4. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja.

5. Pengaruh Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Mayoritas lambatnya serapan anggaran terjadi dikarenakan proses tender yang memakan waktu beberapa bulan, hal ini dikarenakan ada beberapa proses teknis dan non teknis yang harus dijalankan dan harus melalui prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh aturan UU (Handayani, 2017). Lambatnya proses lelang ditambah lagi konflik-konflik yang terjadi selama proses tender berlangsung semakin memperparah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk implementasi anggaran. Pengadaan barang/ jasa merupakan

penerapan teori agensi sebagai kewajiban agen untuk memenuhi kontrak kerja dengan principal. Realisasi belanja langsung untuk melaksanakan program dan kegiatan di setiap OPD, dapat dilaksanakan dengan swakelola dan melalui penyedia. Pengadaan barang dan jasa yang melalui penyedia dipermudah pelaksanaannya dengan system *e-purchasing*.

Penelitian yang dilakukan Alimudin (2018), Ramadhani & Setiawan (2019) membuktikan bahwa pengadaan barang/jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Dapat diartikan semakin baik pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan maka akan semakin baik pula penyerapan anggaran di suatu OPD.

H5. Pengadaan barang/jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja.

6. Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Pelaksanaan anggaran merupakan implementasi perencanaan anggaran yang telah di susun. Adapun yang terpenting dalam pelaksanaan anggaran adalah proses pelaksanaan anggaran itu sendiri. Sistem informasi akuntansi dan manajemen yang dipakai akan mempengaruhi proses pelaksanaan anggaran tersebut. Anggaran kas disusun setiap bulannya guna memudahkan dan mengendalikan target penyerapan anggaran setiap triwulan yang harus dicapai. Semakin baik tingkat pelaksanaan anggaran akan meningkatkan jumlah serapan anggaran belanja OPD. Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka Peraturan Pemerintah

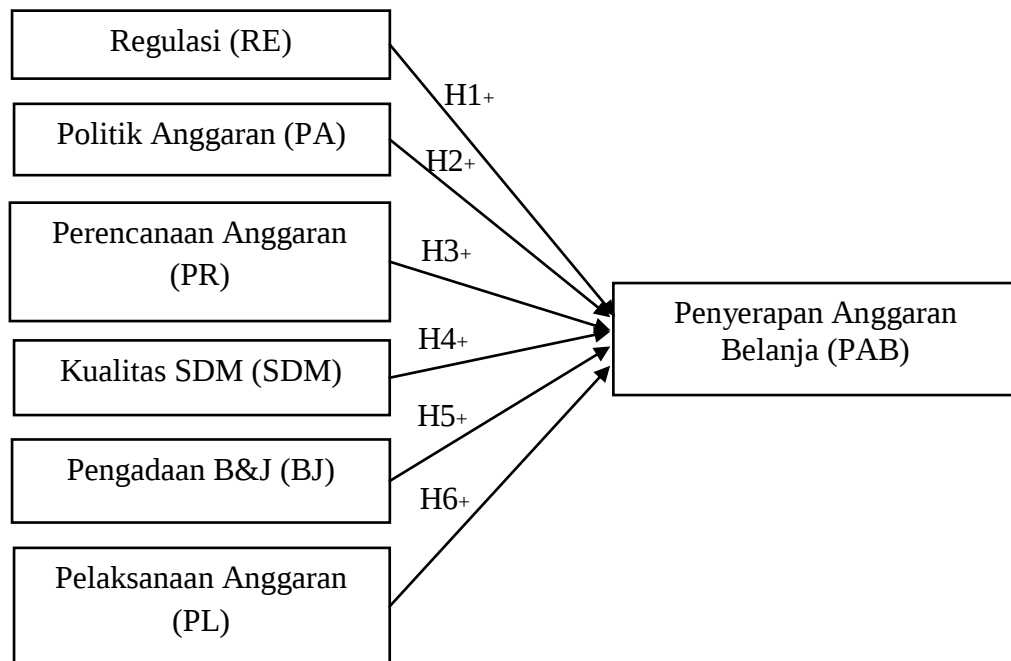
ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir (PP nomor 19 tahun 2019).

Teori agensi mewajibkan pemerintah sebagai agen mampu melaksanakan kontrak kerja kepada masyarakat. Pelaksanaan kontrak kerja tersebut dilaksanakan melalui realisasi program dan kegiatan. Inti dari pelaksanaan kegiatan adalah pelaksanaan anggaran itu sendiri. Proses pelaksanaan anggaran meliputi persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal satker, proses pengadaan barang dan jasa, serta proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Ketiga hal tersebut mempengaruhi besar kecilnya penyerapan anggaran (Malahayati, 2015).

Penelitian Ramdhani & Anisa (2017) menemukan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Semakin baik pelaksanaan anggaran oleh OPD akan berpengaruh pada tingginya tingkat penyerapan anggaran belanja.

H6. Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja.

D. Model Penelitian

Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah OPD di Pemerintah Kabupaten Magelang. Unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang terdiri dari Sekretariat, Inspektorat, 18 Dinas Daerah, 3 Badan Daerah, dan 21 Kecamatan. Penelitian berfokus pada OPD dinas dan badan di Kabupaten Magelang yaitu sebanyak 21 OPD. Alasan peneliti memilih 21 OPD dikarenakan OPD Dinas dan Badan memiliki anggaran yang lebih besar dibandingkan Sekretariat dan OPD Kecamatan, sehingga kendala dalam penyerapan anggarannya dapat diteliti.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Pertimbangan dalam penarikan sampel pada penelitian ini adalah aparat pemerintah daerah Kabupaten Magelang yang menduduki jabatan yang berkaitan dengan anggaran, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Staf bagian Keuangan dan Perencanaan, masing-masing diambil 5 responden sehingga jumlah sampel penelitian sebanyak 105 responden.

B. Teknik Pengambilan Sampel

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Data dikumpulkan secara langsung dari responden dengan sumber asli. Sumber tersebut adalah pegawai yang berkaitan dengan penyerapan anggaran di 21 OPD Kabupaten Magelang. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pernyataan (kuesioner) yang terstruktur untuk dibagikan dan diisi oleh responden. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jawaban terhadap faktor-faktor yang diteliti meliputi regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, kualitas sumber daya manusia, dan pelaksanaan anggaran.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angket yang berisi kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada para pegawai di OPD Dinas dan Badan Kabupaten Magelang, kemudian responden akan mengisi sesuai dengan pendapat dan pemikiran dari responden. Kuesioner yang telah diisi oleh responden, diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak disertakan dalam analisis data. Teknik ini menjadikan responden yang menjadi subyek penelitian harus bertanggungjawab untuk memilih dan menjawab pertanyaan maupun pernyataan.

Cara ini dipilih oleh peneliti dengan pertimbangan metode survei yaitu metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli melalui kuesioner lebih efektif dan efisien untuk dilakukan pada subjek yang jumlahnya banyak. Selain itu dengan data primer peneliti dapat

mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan, karena data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian dapat dieliminir atau setidaknya dapat dikurangi.

3. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
Variabel Dependen		
Penyerapan Anggaran	Penyerapan Anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu (Halim, 2014)	Menggunakan instrumen kuesioner dengan 3 pernyataan yang diadopsi dari penelitian Alimudin (2018) Indikator yang digunakan adalah: 1. Perbandingan realisasi anggaran dengan target penyerapan anggaran 2. Realisasi pertriwulan 3. Konsistensi dalam pelaksanaan program/ kegiatan 4. Ketepatan waktu jadwal penyerapan anggaran Variabel diukur menggunakan skala likert 1-5
Variabel Independen		
Regulasi	Regulasi adalah kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi (Bastian, 2010)	Menggunakan instrumen kuesioner dengan 3 pernyataan yang diadopsi dari penelitian Alimudin (2018) Indikator yang digunakan adalah: 1. Tumpang tindih regulasi 2. Sosialisasi regulasi 3. SOP Variabel diukur menggunakan skala

Variabel	Definisi	Pengukuran
Politik Anggaran	Politik Anggaran adalah proses penentuan kebijakan pelaksanaan anggaran yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan (Sanjaya et al., 2018)	likert 1-5 Menggunakan instrumen kuesioner dengan 4 pernyataan yang diadopsi dari penelitian Handayani (2017) Indikator yang digunakan adalah: 1. Pengalokasian anggaran 2. Asas kebutuhan 3. Asas keadilan Variabel diukur menggunakan skala likert 1-5
Perencanaan Anggaran	Perencanaan anggaran adalah proses pendefinisian tujuan, penentuan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan pengembangan serangkaian rencana komprehensif untuk menggabungkan dan mengkoordinasi berbagai aktivitas. (Ramadhani & Setiawan, 2019)	Menggunakan instrumen kuesioner dengan 5 pernyataan yang diadopsi dari penelitian Alimudin (2018) Indikator yang digunakan adalah: 1. Penetapan tujuan dan strategi 2. Penyusunan program dan anggaran Variabel diukur menggunakan skala likert 1-5
Sumber Daya Manusia	Sumber daya manusia adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi (Ramadhani & Setiawan, 2019)	Menggunakan instrumen kuesioner dengan 4 pernyataan yang diadopsi dari penelitian Alimudin (2018) Indikator yang digunakan adalah: 1. Kompetensi SDM 2. Kuantitas SDM 3. Penugasan rangkap 4. Sertifikasi & Pendidikan Variabel diukur menggunakan skala likert 1-5

Variabel	Definisi	Pengukuran
Pengadaan Barang/Jasa	Pengadaan Barang & Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa oleh kementrian/ Lembaga/ Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa (Perpres No 16 Th 2018)	Menggunakan instrumen kuesioner dengan 8 pernyataan yang diadopsi dari penelitian Alimudin (2018) Indikator yang digunakan adalah: 1. Jumlah Pejabat/Panitia Pengadaan Barang 2. Pemahaman Peraturan 3. Pembentukan Struktur Organisasi 4. Penentuan HPS 5. Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Variabel diukur menggunakan skala likert 1-5
Pelaksanaan Anggaran	Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP,2011)	Menggunakan instrumen kuesioner dengan 3 pernyataan yang diadopsi dari penelitian Ramdhani & Anisa (2017). Indikator yang digunakan adalah: 1. Budaya Kerja 2. Penyelesaian administrasi 3. Jumlah pejabat pengadaan B&J 4. Proses pemeriksaan SPJ 5. Jadwal Anggaran kas Variabel diukur menggunakan skala likert 1-5

Sumber : data variable dan pengukuran variable diolah, 2020

4. Alat Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu metode-metode pengumpulan, penyajian, dan pengaturan data yang berguna untuk membuat gambaran yang jelas variasi sifat data yang dapat mempermudah proses analisis dan interpretasi. Menurut Ghozali (2018), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, *minimum*, *maksimum*, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi).

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018). Uji validitas penelitian ini menggunakan uji *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). *Confirmatory Factor Analysis* digunakan untuk menguji apakah suatu variabel mempunyai *undimensionalitas* atau apakah indikator-indikator dapat mengkonfirmasi sebuah variabel. Analisis faktor konfirmatori dapat menguji apakah indikator benar-benar merupakan indikator dari variabel tersebut.

Analisis faktor konfirmatori akan mengelompokkan indikator ke dalam beberapa faktor. Apabila indikator yang digunakan merupakan indikator konstruk, pengelompokan menjadi satu dengan faktor *loading* yang tinggi. Ketika pengelompokan terdapat kesulitan dalam menginterpretasikan, maka perlu dilakukan rotasi. Alat penting untuk interpretasi faktor adalah *factor*

rotation. Rotasi ortogonal melakukan rotasi 90 derajat, sedangkan rotasi yang tidak 90 derajat disebut *oblique rotation*. Rotasi ortogonal dapat berbentuk *Quartimax*, *Varimax*, *Equimax*, dan *Promax* (Ghozali, 2018).

Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Uji Barlett of Sphericity merupakan uji statistik untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar sampel menyebabkan Barlett test semakin sensitif untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA). Nilai KMO MSA bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus $> 0,50$ untuk dapat dilakukan analisis faktor (Ghozali, 2018).

Validitas diskriminan merupakan konsep tambahan yang mempunyai makna bahwa dua konsep berbeda secara konseptual harus menunjukkan keterbedaan yang memadai. maksudnya ialah seperangkat indikator yang digabung diharapkan tidak bersifat unidimensional. Pengujian validitas diskriminan, prinsip variabel manifes konstruk yang berbeda seharusnya tidak memiliki korelasi yang tinggi. Pengukuran validitas diskriminan menggunakan akar AVE atau *cross loading*.

Nilai *cross loading* untuk setiap variabel yang diukur harus lebih dari 0,5. Sedangkan jika validitas diskriminan dilihat dari akar AVE, maka akar kuadrat AVE setiap konstruk dibandingkan dengan nilai korelasi antar

konstruk dalam model. Jika akar kuadrat AVE lebih besar dari nilai korelasi antar konstruk dalam suatu model, maka validitas diskriminan dinilai baik (Ghozali, 2018)..

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dengan menggunakan alat ukur yang sama. Uji reliabilitas dimaksud untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Pengujian dilakukan dengan menghitung *Cronbach Alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 (Ghozali, 2018).

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Suatu teknik statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel dependen dan beberapa variabel independen (Ghozali, 2018). Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$PAB = \alpha + \beta_1 RE + \beta_2 PA + \beta_3 PR + \beta_4 SDM + \beta_5 BJ + \beta_6 PL + e$$

Keterangan:

PAB	= Penyerapan Anggaran Belanja
α	= Konstanta
β	= Koefisien regresi
RE	= Regulasi
PA	= Politik Anggaran
PR	= Perencanaan Anggaran
SDM	= Kualitas SDM
BJ	= Pengadaan Barang dan Jasa
PL	= Pelaksanaan Anggaran

e = eror

4. Pengujian Hipotesis

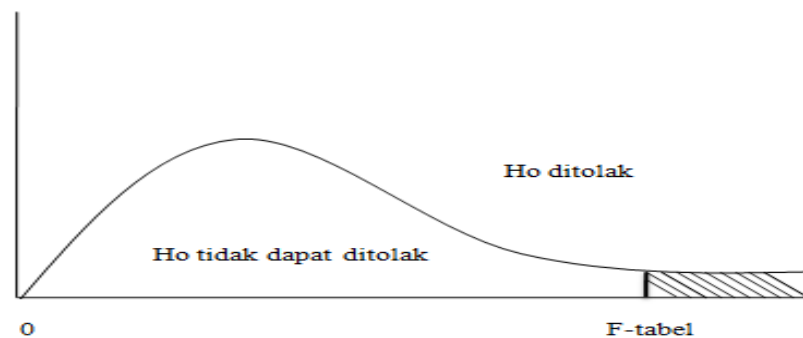
a. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2018). Uji R^2 menunjukkan potensi pengaruh semua variabel independen yaitu Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang/Jasa, dan pelaksanaan Anggaran terhadap variabel dependen yaitu Penyerapan Anggaran Belanja. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu, semakin mendekati 0 maka koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, sebaliknya semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas (Ghozali, 2018).

b. Uji F (*goodness of fit test*)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir suatu nilai aktual (*goodness of fit*). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fit* atau tidak (Ghozali, 2018). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikan 5% dengan derajat kebebasan pemilang $df = k$ dan derajat kebebasan penyebut (df) = $n-k-1$ dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $P\ value < \alpha = 0,05$, maka model yang digunakan dalam penelitian bagus (*fit*).
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $P\ value > \alpha = 0,05$, maka model yang digunakan dalam penelitian tidak bagus (*tidak fit*).

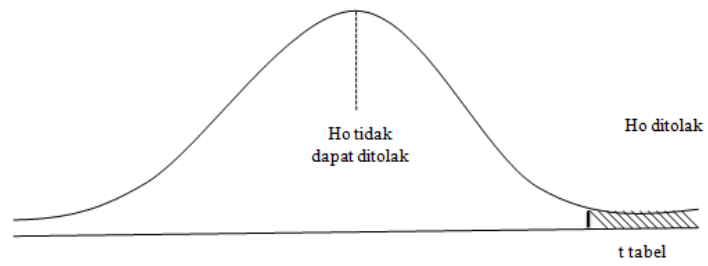


Gambar 3.1
Uji F

c. Uji Statistik t (*t-test*)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = n-1$ (I Ghozali, 2018). Dasar kriteria penerimaan hipotesis:

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $P\ value < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti variabel independen mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $P\ value > \alpha = 0,05$, maka H_0 tidak ditolak dan H_a tidak diterima, berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Uji t Kriteria Positif

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, pengadaan barang/ jasa, dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja pada OPD Kabupaten Magelang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 86 pegawai yang memiliki jabatan sebagai KPA, Kasubbag Keuangan, PPK, Pejabat Pengadaan, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan staf pada bagian program/keuangan. Temuan hasil penelitian ini politik anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja dan regulasi berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran belanja. Sedangkan perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, pengadaan barang/jasa, dan pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Terdapat 5 pernyataan yang tidak valid dalam variabel pengadaan barang/ jasa, dimungkinkan ada indikator – indikator lain yang mewakili pengadaan barang/ jasa sehingga mampu mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran belanja.

2. Objek dalam penelitian ini hanya 21 OPD Dinas/ Badan dan tidak termasuk OPD Kecamatan di Kabupaten Magelang, sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk OPD seluruh Kabupaten Magelang.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan indikator – indikator penelitian, sehingga diharapkan mampu meningkatkan penjelasan faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperluas objek penelitian, misalnya di seluruh OPD Kabupaten Magelang.